

ABSTRAK

UPAYA INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI DEPOT TAHANAN IMIGRESEN (DTI) MALAYSIA

Oleh

LEONNY MASRIFA FAZRI

Pekerja Migran Indonesia mengalami keterpurukan akibat dari penahanan di DTI Malaysia. Laporan dari KBMB dan HRW mengenai kondisi DTI Malaysia yang tidak sesuai dengan standar minimum *Nelson Mandela Rules* menjadi penyebab PMI mengalami keterpurukan dalam blok tahanan. *Nelson Mandela Rules* digunakan negara-negara untuk mempertimbangkan keamanan bagi tahanan imigrasi sebelum dideportasi ke negara asalnya dan Pemerintah Malaysia mengabaikannya. Hal ini berimbas pada penghilangan HAM setiap tahanan imigrasi yang ditahan di DTI Malaysia. Tentunya hal ini berdampak pada kerugian secara sosial dan kemanusiaan.

Penelitian menggunakan analisis pada konsep diplomasi perlindungan yang berfokus pada dua kerangka, yaitu perlindungan sebagai subjek perlindungan yang terlibat dalam aktivitas diplomatik dan perlindungan konsuler terhadap PMI. Metodologi menggunakan kualitatif melalui analisis deskriptif untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Indonesia dalam melindungi PMI. Fokus penelitian adalah upaya yang dilakukan Indonesia dalam kurun waktu 2018–2023. Melalui teknik studi literatur serta berbagai sumber data terutama laman resmi GDP, BP2MI, KBMB, dan sumber terkait lainnya. Data dianalisis dengan teknik reduksi serta triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan, upaya Indonesia melalui dua pelaksanaan, Pemerintah Indonesia membangun MoU dengan Pemerintah Malaysia dan bantuan konsuler sebagai bagian dari perlindungan PMI. Hasil dari upaya tersebut, yakni Indonesia berhasil dengan cepat memulangkan PMI yang menjadi deportan.

Kata kunci : Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan, Diplomasi, HAM, Indonesia, Malaysia.

ABSTRACT

INDONESIA'S EFFORTS IN PROTECTING INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) AT THE IMMIGRATION DETENTION CENTER (DTI) MALAYSIA

By

LEONNY MASRIFA FAZRI

Indonesian Migrant Workers have suffered setbacks due to their detention in Malaysia's (DTI). Reports from KBMB and HRW regarding the conditions in Malaysian DTIs, which do not meet the minimum standards of the Nelson Mandela Rules, have contributed to the deteriorating conditions faced by these workers in detention blocks. The Nelson Mandela Rules are used by countries to ensure the safety and humane treatment of immigration detainees prior to their deportation to their home countries. However, the Malaysian government has disregarded these rules, resulting in human rights violations against every immigration detainee held in Malaysian DTIs. This situation has led to significant social and humanitarian harm. This research uses an analytical approach based on the concept of protective diplomacy, focusing on two frameworks: protection as a subject engaged in diplomatic activities and consular protection for Indonesian Migrant Workers (PMI). The methodology is qualitative, employing descriptive analysis to illustrate Indonesia's efforts to protect its migrant workers. The focus of the study is on Indonesia's protective efforts from 2018 to 2023. The data was collected through literature studies and various data sources, particularly from official websites such as GDP, BP2MI, KBMB, and other relevant sources. The data was analyzed using data reduction and triangulation techniques. The research findings show that Indonesia's efforts took place in two main areas: the Indonesian government established a Memorandum of Understanding (MoU) with the Malaysian government and carried out various protection efforts for Indonesian Migrant Workers. As a result of these efforts, Indonesia was able to promptly repatriate deported PMI.

Key Words : Migrant Workers, Protection, Diplomacy, Human Rights, Indonesia, Malaysia.